

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian negara manapun baik negara maju maupun sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu target kebijakan pembangunan di setiap daerah di Indonesia agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil. Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental dan menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan berbagai jenis program pembangunan. Akan tetapi satu hal yang mengganggu pikiran kita jika dihadapkan dengan fenomena kemiskinan, begitu banyak teori untuk menjelaskan dan memberi solusi tentang penanggulangan kemiskinan, namun tidak dapat dipungkiri fenomena kemiskinan masih selalu ada di sekitar kita (Ubur, 2011). Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan, mengapa kemiskinan selalu ada? Apakah teori yang ada tidak cukup untuk menjelaskan mengenai kemiskinan? Apakah belum maksimal upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan?

Menurut para ahli ekonomi kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensial. Kemiskinan yang bersifat multidimensial dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa, miskin asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Dilain sisi, kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, an, serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam gunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan gunan manusia (Arsyad, 2010). Dimensi-dimensi kemiskinan



tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Wijayanti, 2005). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

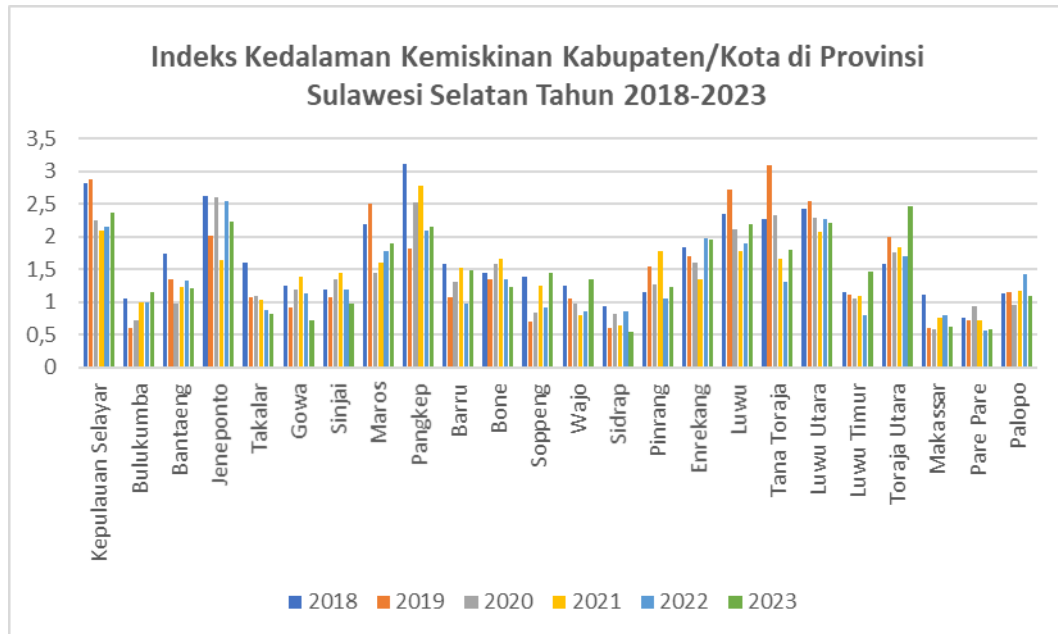
Menurut Todaro dan Smith (2015), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut: 1) tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah dan pertumbuhan ekonominya tergolong lambat, 2) pendapatan perkapita masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat, 3) distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata, 4) mayoritas penduduk di negara-negara dunia ketiga harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut, 5) fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit, 6) fasilitas pendidikan dikebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai, disebabkan mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuka kesempatan untuk orang miskin ke luar dari lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal.

Kemiskinan bukanlah masalah baru akan tetapi sampai saat ini menjadi isu utama, ditunjukkan dengan ditempatkannya isu kemiskinan sebagai tujuan pertama dalam SDGs dinyatakan *no poverty* yang menjadi point prioritas SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, yang targetnya menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional dan internasional, yang berdasarkan pada strategi

gunan yang berpihak pada yang miskin dan gender sensitive, untuk cepat investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan (SDG a, 2022).



Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah di Indonesia yang belum mampu mengatasi masalah kemiskinan dengan maksimal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2018-2023 tingkat kedalaman kemiskinan dapat kita lihat :



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui dari pengukuran kemiskinan menggunakan kedalaman kemiskinan / *Poverty Gap Index* (P1), dengan melihat ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan melalui gambar 1.1 bahwa kedalaman kemiskinan yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi yang diakibatkan selama periode 2019 hingga 2022 terdapat pandemi Covid-19 yang melanda dunia yang berdampak terhadap kemiskinan. Wilayah yang kedalaman kemiskinan tertinggi selama enam tahun terakhir ada



pada Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten luwu.

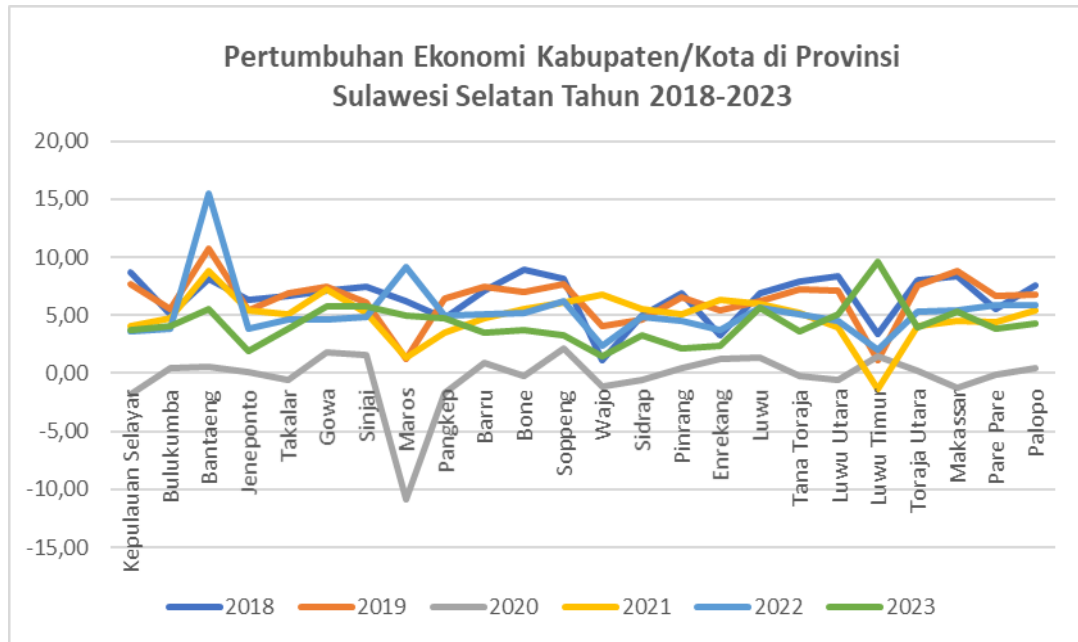
Tingginya angka kemiskinan akan menyebabkan hadirnya masalah sosial lainnya seperti peningkatan kriminalitas, banyaknya anak maupun orang dewasa melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya mereka kerjakan, konflik sosial, keterbatasan dalam mengakses Pendidikan, dan lain-lain. Berbagai masalah sosial tersebut dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di daerah yang menghadapi persoalan kemiskinan, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan.

Standar hidup di dunia ekonomi tergantung pada kemampuan memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan produksi memiliki kontribusi dalam menambah lapangan pekerjaan yang mendorong pengurangan kemiskinan (Mankiw, 2018). Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari nilai PDB ataupun PDRB suatu wilayah. PDB atau PDRB ini menunjukkan total nilai yang merupakan jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa atau nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang mendukung perwujudan pembangunan pada suatu daerah atau wilayah.

Pembangunan pada suatu daerah dimaksudkan untuk mendorong, memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membangun daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang juga merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan (Agustini dan Kurniasih, 2017).



Meskipun begitu, data yang ada menunjukkan bahwa meningkatnya produksi yang tercermin dalam tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tidak selalu diikuti dengan berkurangnya angka kemiskinan pada wilayah tersebut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat tren pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang dihitung dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dari tahun 2018 sampai tahun 2023 pertumbuhannya mengalami fluktuasi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sehingga berimbas pada berbagai sektor, salah satunya sektor perekonomian di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan cukup baik, namun hal tersebut masih belum mampu mengentaskan kemiskinan sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Mankiw. Jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami kenaikan tanpa disertai dengan perluasan kesempatan kerja telah menyebabkan angka kemiskinan meningkat.



Ingginya angka kemiskinan tentu akan menjadi sebuah persoalan menghambat perwujudan pembangunan di suatu negara atau daerah.

Oleh karena itu, dalam mengentaskan masalah tersebut diperlukan adanya peran pemerintah dalam mengatur jalannya suatu perekonomian. Menurut Sukirno (2013), pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu kebijakan fiskal juga diharapkan mampu membuka lebar kesempatan kerja yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga pada akhirnya mampu menekan kemiskinan.

Investasi adalah mobilitas sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Apabila semua tenaga kerja berkualitas terlibat aktif dalam perekonomian, maka akan meningkatkan *output* barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Ocaya et al., 2012).

Beberapa bukti empiris berikut menjadi referensi dilakukannya penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Saharuddin dan Said (2023) menemukan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sasana dan Kusuma (2018) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah, pendapatan per kapita, partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.



Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik menganalisis kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan judul penelitian **“Peran Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh investasi terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.
2. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya terutama yang berhubungan dengan masalah yang sama, sekaligus menjadi sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan secara umum adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yakni sandang, pangan, dan papan. Menurut Chambers dalam Rahman et al. (2019) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi yaitu: (1) kemiskinan (*poverty*), (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependency*), dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan tidak hanya kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan dan ketidakberdayaan menentukan jalan hidup sendiri.

Kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi dalam Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) sebagaimana yang dikatakan oleh Ragnar Nurkse “*a poor country is poor because it is poor*” yang artinya bahwa negara miskin disebabkan masyarakat miskin, modal yang terbatas dengan pasar yang tidak sempurna serta adanya keterbelakangan, menyebabkan produktivitas rendah. Produktivitas rendah menyebabkan upah yang diterima rendah. Upah atau pendapatan rendah akan berakibat langsung terhadap konsumsi, tabungan maupun investasi. Rendahnya investasi berdampak kembali pada keadaan awal seperti keterbelakangan dan seterusnya, sehingga menggambarkan akan membentuk suatu lingkaran (Handayani, 2018). Kemiskinan adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan per day yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dimana



mereka hidup di bawah tingkat pendapatan minimum tertentu (Todaro dan Smith, 2013). Menurut Kuncoro dalam Wahyudi (2020), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah. Menurut UNDP orang dapat dikatakan miskin apabila mereka memiliki pendapatan rendah dan tidak memiliki sumber daya lain yang menopang kehidupan dalam memenuhi makanan, barang-barang material, fasilitas standar dan layanan yang memungkinkan mereka bisa memainkan peran dalam kehidupannya, memenuhi kewajiban dan berpartisipasi (Saryana, 2020).

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut, garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Jenis kemiskinan menurut BPS dilihat dari dua sisi, yaitu: 1. Kemiskinan Absolut adalah kemiskinan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang terbatas pada kebutuhan pokok sehingga orang tersebut dapat disebut hidup dengan layak. Kemiskinan absolut diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tersebut dengan tujuan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin absolut apabila pendapatan yang diperolehnya kurang dari garis kemiskinan dan tidak



mampu mencukupi kebutuhan pokoknya; 2. Kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial. Apabila seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, namun masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut termasuk kategori miskin relatif. Semakin tinggi kesenjangan tingkat pendapatan antara golongan atas dengan golongan bawah maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, kemiskinan relatif berhubungan erat dengan distribusi pendapatan. Sedangkan menurut Sastraatmadja dalam Manula (2020), menyebutkan bahwa kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: 1. *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun; 2. *Cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; 3. *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman yang sering ditemui pada kasus nelayan dan pertanian; 4. *Accident poverty*, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik dan kekerasan atau akibat dari sesuatu kebijakan yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan tiga indikator kemiskinan, yaitu 1). Tingkat kemiskinan/*Head Count Index* (PO), adalah persentase penduduk dengan pengeluaran per kapita kurang dari garis kemiskinan. 2). Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gap Index* (P1), adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. 3). Keparahan Kemiskinan/*Poverty Severity Index* (P2), adalah indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Setiap negara tentu memiliki tujuan dalam mencapai tingkat pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Pembangunan suatu negara dapat diwujudkan melalui dukungan pembangunan pada setiap daerah di dalamnya. Salah satu faktor yang mendorong perwujudan pembangunan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional atau daerah (Suripto dan Subayil, 2020). Pertumbuhan ekonomi secara umum adalah kenaikan umum dalam tingkat barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian suatu negara selama periode waktu tertentu. Menurut Sukirno (2010) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Menurut teori Solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi antara lain peningkatan porsi tabungan akan meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatkan investasi yang sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Mendorong kemajuan teknologi dapat meningkatkan pendapatan per angkatan kerja sehingga pemberian kesempatan berinovasi pada sektor swasta akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Solow menjelaskan bahwa investasi, tabungan, pertumbuhan penduduk, teknologi mempengaruhi tingkat perekonomian dan nbuhanannya (AG et al., 2018).



Menurut Sukirno (2006) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain: (1) tanah dan kekayaan alam, (2) jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, (3) barang-barang modal dan tingkat teknologi, dan (4) sistem sosial dan sikap masyarakat. Lain halnya dengan pendapat Jhingan (2007), menurutnya proses pertumbuhan ekonomi memang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi tanpa faktor nonekonomi yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Mangkoesebroto (2002) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Sukirno (2004) pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu kebijakan fiskal juga diharapkan mampu membuka lebar kesempatan kerja yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga pada akhirnya mampu menekan kemiskinan.

Teori Rostow dan Musgrave yang menghubungkan hubungan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi



persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Dan pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah menjadi salah satu komponen pembentuk pengeluaran pemerintah agregat yang mampu memengaruhi peningkatan kegiatan ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Keynes, tentunya harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu mendorong perwujudan pembangunan secara nasional. Untuk mewujudkan pembangunan secara nasional ini, diperlukan sinergitas yang baik antar daerah di dalamnya. Disinilah pemerintah daerah berperan melalui instrument anggaran dalam mengatur jalannya perekonomian di daerahnya masing-masing. Belanja daerah atau pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah di dalam APBD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan anggaran yang digunakan pemerintah dalam membiayai berbagai kegiatan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sangatlah penting untuk mengatur jalannya perekonomian agar tercipta stabilitas pada sistem perekonomian. Anggaran pendapatan dan pengeluaran pemerintah menyangkut dua hal yaitu belanja aparatur adalah belanja yang dampaknya tidak secara langsung dapat dinikmati masyarakat dan belanja pelayanan publik merupakan

ia yang manfaat dan dampak secara langsung dapat dinikmati masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mendorong belanja digunakan efektif serta mendukung secara penuh belanja



yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik sehingga memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi masyarakat.

2.1.4 Investasi

Menurut Sunariyah dalam Kurniawan (2016) investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Menurut Todaro (2000) investasi memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Hal ini karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi yang nantinya akan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat akan berpengaruh pada pendapatan per kapita yang meningkat pula. Menurut Sukirno (2008) investasi dapat juga diartikan sebagai pengeluaran-pengeluaran atau penanaman modal bagi perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa mendatang.

Investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran yang berupa barang modal, peralatan modal, bangunan dan barang-barang inventaris dimana gunanya sebagai penambahan produksi barang dan jasa serta untuk meningkatkan produktivitas kerja agar terjadi peningkatan output yang dihasilkan untuk masyarakat (Suharlina, 2020).

Investasi pada hakekatnya merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal akan mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi serta mencerminkan tinggi dan lesunya pembangunan yang terbentuk

ana, 2020). Investasi sangat berperan besar dalam menumbuhkan onomian di daerah karena adanya *multiplier effect* yang dihasilkan rvestasi tersebut dimana produktifitas akan meningkat, memacu



pertumbuhan, dan memiliki peluang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan (Kolibu et. al., 2017). Hal tersebut menunjukkan bagaimana peran penting investasi dalam perekonomian.

Pembentukan modal dari kegiatan investasi akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Pembentukan modal tersebut membantu memenuhi keperluan penduduk yang semakin meningkat. Jika pembentukan modal menyebabkan penggunaan sumber daya alam secara tepat dan adanya pendirian berbagai jenis industri, maka tingkat pendapatan akan bertambah dan berbagai macam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati berbagai macam komoditi, standar hidup meningkat, serta kesejahteraan ekonomi. Proses pembentukan modal melalui investasi ini juga membantu menaikkan output yang pada gilirannya menaikkan laju dan tingkat pendapatan nasional (Purba et. al., 2021).

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan investasi baik investasi PMDN (penanaman modal dalam negeri) maupun PMA (penanaman modal asing) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga akan pemeratakan dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara kontinu yang disebut sebagai pembangunan ekonomi. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup.

Investasi yang tercermin dalam kegiatan penanaman modal baik itu berupa penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri memiliki peranan tersendiri bagi kelanjutan pembangunan dan



nbuhan ekonomi. Menurut Putra (2019), penanaman modal asing) dan investasi portofolio merupakan salah satu sumber iayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal

tersebut juga berlaku bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang memiliki fungsi dan kedudukan yang penting karena investasi berbentuk penanaman modal ini menjadi aset dalam meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan negara. Penanaman modal ini berperan sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi masyarakat serta berperan sebagai sarana untuk mengukur pembangunan suatu negara dan juga pendapatan nasional bruto.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Beberapa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penduduk miskin diantaranya ditempuh melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Menurut Sukirno (2013), pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrument anggaran. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk meningkatkan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rosen, 2014).

Rostow dan Musgrave yang mengembangkan model tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dan dampaknya terhadap pembangunan. Kedua tokoh ini menyatakan bahwa tahap-tahap pembangunan akan berjalan dengan baik jika didukung dengan pengeluaran pemerintah yang memadai. Tahapan pembangunan tersebut dapat menciptakan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang menurunkan kemiskinan dengan adanya pengeluaran pemerintah yang teralokasi dengan baik. Peran pemerintah di tahap pembangunan ini misalnya berupa penyediaan prasarana



atau pelayanan public serta pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program pelayanan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hari tua (Mangkoesoebroto, 2016).

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah khususnya pemerintah daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga memungkinkan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan (Pratama dan Utama, 2019).

Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan pada sektor publik yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran pemerintah pada kedua sektor publik tersebut akan meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan handal serta memperbaiki standar kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengeluaran pemerintah juga secara khusus ditujukan dalam upaya pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial. Misalnya pengeluaran pemerintah untuk pertanian, pembangunan industri, pengembangan kegiatan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Untuk pengembangan sektor ekonomi potensial, maka pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dasar yang memadai. Penyediaan infrastruktur menjadi syarat utama bagi proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk penyediaan infrastruktur diharapkan akan dapat menambah kapasitas produksi dan memberikan efek *multiplier* dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur akan membuka daerah-daerah yang terisolasi, mengurangi biaya produksi, mendorong munculnya pusat-pusat aktivitas ekonomi baru seperti industri dan pasar, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan beli konsumen (Wahyudi, 2020).



Belanja pemerintah yang dinilai dapat terhubung langsung dengan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan adalah belanja modal. Adanya belanja modal akan mendorong tersedianya berbagai infrastruktur yang selanjutnya akan memudahkan berbagai proses kegiatan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan kualitas dan taraf kemakmuran masyarakat sehingga mampu mengentaskan masalah kemiskinan. Hubungan negatif atau tak searah ini sejalan dengan temuan (Ginting dan Hasibuan, 2019) dimana kenaikan pengeluaran pemerintah yang dilakukan akan menurunkan angka kemiskinan.

Menurut Putri et. al., (2021), pengeluaran pemerintah daerah dapat tidak memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. dimana hal tersebut terjadi apabila porsi belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah daerah dinilai kurang untuk membiayai berbagai kegiatan produktif dan untuk penambahan lapangan pekerjaan maupun pendapatan baru untuk masyarakat.

Menurut Barro (1990) dalam pertumbuhan endogen memprediksi bahwa hanya belanja pemerintah yang produktif dan positif akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan jangka panjang. Barro membagi pengeluaran pemerintah menjadi produktif dan tidak produktif, apabila pengeluaran tersebut mempunyai efek positif langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan mampu meningkatkan produksi dan efisiensi tenaga kerja sehingga mendorong pertumbuhan, maka pengeluaran tersebut produktif. Pengeluaran pemerintah untuk non produktif berkorelasi dengan pendapatan per kapita yang rendah. Pengeluaran pemerintah yang tidak produktif berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian Asrudi

) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah produktif dan meningkatkan lapangan pekerjaan profitabilitas



investasi melalui *multiplier effect agregat demand* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.2.2 Hubungan Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2006), kemiskinan disebabkan oleh tiga hal, kemiskinan timbul secara mikro karena ketidaksamaan kepemilikan sumber daya yang menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Hal lainnya yaitu, adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang mendorong rendahnya produktivitas. Penyebab berikutnya adalah perbedaan akses terhadap modal dimana kurangnya akses modal akan menurunkan produktivitas yang mendorong penurunan tingkat pendapatan sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan akan sulit dilakukan. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi ini selanjutnya berakibat pada keterbelakangan atau kemiskinan.

Adanya investasi akan mendorong perluasan lapangan kerja yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menciptakan peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang selanjutnya mampu menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Purba et.al., (2021), kegiatan investasi seperti penanaman modal dalam negeri atau asing yang berlangsung di suatu daerah akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dimana investasi tersebut memungkinkan masyarakat terserap dalam dunia kerja dan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu, masyarakat yang sebelumnya tergolong sebagai pengangguran akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dengan adanya investasi tersebut. Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kemiskinan.



investasi yang meningkat ditunjukkan melalui pengembangan usaha, tentunya akan memerlukan tenaga kerja dalam melaksanakan kegiatan produksinya. Menurut Agustina dan Kurniasih

(2017), apabila jumlah lapangan kerja semakin banyak yang diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja yang terserap, maka akan berpotensi menurunkan jumlah penduduk miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tenaga kerja yang terserap memperoleh pendapatan melalui kegiatan produksi yang dilakukan.

Menurut Ocaya et al., (2012) penurunan tingkat kemiskinan disebabkan adanya investasi, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Investasi adalah mobilitas sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa yang akan datang. Apabila semua tenaga kerja berkualitas terlibat aktif dalam perekonomian, akan meningkatkan output barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Astuti, 2018).

Apabila investasi mengalami peningkatan maka akan meningkatkan perekonomian, hal ini diindikasikan kenaikan investasi akan memicu pertumbuhan ekonomi karena peningkatan penanaman modal (Todaro, 2000). Penanaman modal akan berakibat peningkatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. Peningkatan produksi barang dan jasa akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap daerah atau

ah memerlukan investasi untuk meningkatkan kualitas produksi dimiliki wilayahnya, investasi haruslah ditanamkan di berbagai r perekonomian, agar memperluas pasar, serta produk yang dihasilkan



mampu bersaing dan memiliki harga jual yang tinggi tentunya dengan kualitas bagus, sehingga mampu meningkatkan perekonomian (Khakim, 2022).

Pack, H. dan J. Page dalam Seran (2017) dalam studi empirisnya menyatakan bahwa terdapat dua sumber utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan produktivitas. Investasi berkaitan dengan pemakaian faktor produksi kapital (K). Sedangkan produktivitas merujuk pada peningkatan produktivitas melalui kemajuan teknologi. Peningkatan produktivitas dari masing-masing faktor produksi dapat dihitung secara parsial, atau dihitung secara total untuk semua input produksi.

Achyarnis, et al (2020) menjelaskan kegiatan investasi memungkinkan masyarakat untuk terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja. Meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat, menyebabkan jumlah kemiskinan berkurang pernyataan ini didasarkan penelitiannya tentang *Determinants of Poverty in Central Java Province 2013-2018* hasil penelitiannya yaitu investasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi jawa tengah.

2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Mankiw (2018) menyatakan bahwa PDB menunjukkan dua hal dalam satu waktu, salah satunya adalah pendapatan total yang diperoleh setiap orang pada kegiatan ekonomi. Dengan demikian, PDB perkapita merupakan total pendapatan rata-rata per orang dalam perekonomian. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui penghitungan PDB merupakan salah satu cara terbaik untuk mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nilai PDB berhubungan erat dengan standar hidup warga negaranya. Dengan kata lain, tingkat standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Adanya pertumbuhan ekonomi yang



tercermin melalui peningkatan produksi akan mendorong penambahan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan.

Dapat dikatakan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan nilai PDB atau PDRB menunjukkan adanya kenaikan pendapatan per kapita, dimana hal ini memberikan gambaran terjadinya kenaikan nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh tiap penduduk dari aktivitas produksi. Pendapatan per kapita juga menunjukkan gambaran kasar mengenai rata-rata pendapatan setiap penduduk. Terjadinya kenaikan pendapatan per kapita akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. hal ini dapat terjadi selama angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk suatu wilayah.

Indikator yang penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Agar pembangunan tercipta, maka perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan yang ada di dalam suatu negara ataupun suatu daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Marisa, 2019). Dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan pada pendapatan secara terus menerus secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan yang dikatakan Sumitro (dalam Rumahorbo, 2014) pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita untuk menentukan pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas perkapita dengan meningkatkan modal peralatan dan keterampilan. Oleh karena itu dengan meningkatnya pendapatan per kapita, kesejahteraan akan meningkat dan kemiskinan berkurang. Maka dari itu, diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.



Sukirno (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah

bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan, artinya, pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar di setiap golongan pendapatan termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*).

Sejalan dengan hal tersebut menurut Hasan dan Aziz (2018), pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berarti pula tingkat produksi tinggi akan mengakibatkan perekonomian masyarakat berkembang. Adanya perluasan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari yang tidak bekerja menjadi bekerja. Hal tersebut menjadi bukti bagaimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi mutlak harus ada agar terjadi penambahan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan harapan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kolibu et. al., 2017). Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai PDB atau PDRB yang dimana jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi meningkat (menambah kapasitas perekonomian) akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam dunia kerja dan mendorong penurunan angka pengangguran. Sehingga, hal ini akan meningkatkan pendapatan per kapita yang pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan.

Hubungan antara pertumbuhan dan perubahan angka kemiskinan juga terlihat pada awal 1990-an awal abad ke-21. Secara keseluruhan terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan selama beberapa dekade terakhir dan bagian populasi yang hidup dalam kemiskinan. Hal inilah yang mendorong banyak ekonomi percaya bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu cara paling efektif dalam mengurangi angka kemiskinan.



2.3 Tinjauan Empiris

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang dijadikan pedoman atau landasan dalam penelitian ini.

Saharuddin dan Said (2023) meneliti tentang *the effect of government investment and spending on poverty in Indonesia*. Metode analisis yang digunakan regresi linear berganda dengan program Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi mempunyai pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Zuffar, Aditya dan Tuty (2023) meneliti tentang *the effect of investments and government expenditure towards economic growth of districts/cities in west java 2016-2020*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, terdapat pengaruh negatif dan signifikan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, terdapat pengaruh simultan investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Muhajir et al., (2023) meneliti tentang *the effect of government spending and investment on unemployment and poverty rate in North Penajam Paser District (PPU) East Kalimantan Province*. Menggunakan data sekunder dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling (SEM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, sedangkan



investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Prasasti (2022) meneliti tentang pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Bryan et al., (2021) meneliti tentang analisis pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2011-2019. Metode analisis yang digunakan regresi berganda ordinary least square (OLS) dengan program Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Millenia dan Zaini (2021) meneliti tentang pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, Pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Yolanda et al. (2020) meneliti tentang analisis *of the effect of investment and unemployment on economic growth and poverty in north Sumatra Province*. Menggunakan data panel dengan periode 2014-2018 dengan metode path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. investasi memiliki pengaruh



yang signifikan pada kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan investasi memiliki pengaruh negatif melalui pertumbuhan ekonomi. Variabel pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Pratama dan Utama (2019) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Investasi memiliki pengaruh langsung positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah dan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Sasana dan Kusuma (2018) meneliti *government expenditure and poverty in Indonesia*, adapun data yang digunakan yaitu 33 provinsi di Indonesia periode 2008-2013, menggunakan *fixed effect model* (FEM), hasil penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah, pendapatan per kapita, partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

Ezra, Daisy dan Krest (2017) meneliti tentang pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan kemiskinan di Minahasa Utara melalui pertumbuhan ekonomi sebagai intervening variabel. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, belanja modal secara langsung berpengaruh positif



terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

